

Pengaruh *Civic Knowledge* Terhadap Sikap Demokratis Peserta Didik SMA di Kabupaten Kuningan

Muhammad Rabi Azhar¹ Dadang Sundawa² Vini Agustiani Hadian³

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: mrabiazhar2003@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the effect of civic knowledge on the democratic attitude of senior high school students in Kuningan Regency. The research used a quantitative approach with a cross-sectional survey method. Data were collected through a test to measure civic knowledge and an attitude scale questionnaire to assess democratic attitudes. The sample consisted of 393 students selected using cluster sampling techniques. The results show that most students have a good level of civic knowledge and democratic attitudes. Based on simple linear regression analysis, civic knowledge has a significant effect on democratic attitudes, with a determination coefficient of 0.537. Thus, civic knowledge contributes 53.7% to the development of students' democratic attitudes.

Keywords: *Civic Knowledge, Democratic Attitude, Senior High School Students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) terhadap sikap demokratis peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei jenis cross-sectional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes untuk mengukur civic knowledge dan angket skala sikap untuk menilai sikap demokratis. Sampel penelitian berjumlah 393 peserta didik SMA yang diperoleh melalui teknik cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki tingkat civic knowledge dan sikap demokratis yang tergolong baik. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diketahui bahwa civic knowledge berpengaruh signifikan terhadap sikap demokratis dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,537. Dengan demikian, civic knowledge memberikan kontribusi sebesar 53,7% terhadap pembentukan sikap demokratis peserta didik.

Kata Kunci: Pengetahuan Kewarganegaraan, Sikap Demokratis, Siswa SMA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, menekankan pada partisipasi warga negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Berbagai negara di dunia menggunakan prinsip demokrasi sebagai dasar dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh warganya (Akmalul Birri dkk., 2023). Sementara itu, demokrasi juga dipahami sebagai sebuah cara pandang hidup mengenai tata kelola masyarakat. Dengan demikian, demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan institusi politik, mekanisme peraturan, maupun proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang turut memengaruhi kualitas hidup warga negara (Husni, 2021). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penguatan terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai demokrasi menjadi sangat penting. Demokrasi tidak akan tumbuh secara substansial hanya melalui instrumen hukum dan kelembagaan semata, melainkan harus didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Dalam konteks ini, sikap demokratis merupakan cerminan utama dari pemahaman

dan pengamalan nilai-nilai demokrasi. Menjadikannya salah satu pondasi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Cahyati dkk., 2024). Hal tersebut semakin signifikan terutama di tengah dinamika sosial-politik yang kerap kali menampilkan paradoks antara semangat demokratisasi dari era reformasi dan praktik otoritarianisme dari masa orde baru yang masih tersisa (Ramadhan dkk., 2019, hlm. 4–5).

Paradoks ini menciptakan ketegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana cita-cita demokrasi prosedural kerap berbenturan dengan kecenderungan kontrol dan pembatasan ruang publik. Mengingat bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu pada aspek institusional, tetapi juga pada budaya politik warga negara, maka investasi terhadap pengembangan sikap demokratis warga negara melalui pendidikan merupakan langkah strategis. Sebagaimana ditegaskan dalam temuan (Prabowo, 2023), pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi memegang peran krusial dalam membentuk individu yang memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai persoalan sosial serta mampu berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat. Praktik pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi secara sistematis akan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Di dalamnya terdapat salah satu kompetensi utama yang dikenal dengan sebutan *civic knowledge*, yakni pengetahuan tentang aspek substansial yang perlu dimiliki oleh warga negara. Pengetahuan ini meliputi sistem politik dan pemerintahan, hukum, nilai dan prinsip demokrasi, sistem sosial yang ideal, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. *Civic knowledge* berfungsi sebagai dasar kognitif yang memungkinkan individu memahami secara rasional konsep-konsep demokrasi dan menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari (Jamaludin & Alanur S, 2021; Latif dkk., 2024). Dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah atas (SMA), penanaman *civic knowledge* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik sebagai bagian integral dari pembelajaran. Peserta didik yang memiliki *civic knowledge* yang baik diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai perbedaan, terbuka terhadap kritik, dan siap berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Penelitian ini berpijak pada pendekatan psikologi sosial mengenai struktur atau komponen pembentuk sikap (*attitude*), yang terdiri dari tiga komponen utama: kognitif, afektif, dan konatif. Azwar sebagaimana dikutip dalam Wawan & Dewi, hlm. (2017, hlm. 32), menjelaskan bahwa sikap dalam strukturnya terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang atau melengkapi. Pertama, terdapat komponen kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan keyakinan, pandangan, atau pengetahuan seseorang terhadap suatu objek sikap. Komponen ini mencerminkan bagaimana individu memahami dan menilai objek tersebut secara rasional. Kedua, komponen afektif, yakni unsur yang menggambarkan reaksi emosional atau perasaan positif maupun negatif individu terhadap objek sikap. Terakhir, komponen konatif merujuk pada kecenderungan atau dorongan perilaku yang mengarahkan individu untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan sikap yang dimilikinya (Wawan & Dewi, 2017, hlm. 32). Teori lain yang melandasi penelitian ini adalah teori konsistensi afektif-kognitif (*affective-cognitive consistency theory*) dari Rosenberg, yang menyoroti keterkaitan komponen kognitif dan afektif dari sikap. Dalam pandangannya, komponen kognitif tidak sebatas pada informasi atau pengetahuan individu mengenai suatu objek, tetapi juga mencakup keyakinan pribadi yang mengaitkan objek tersebut dengan nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh individu. Dengan kata lain, penilaian seseorang terhadap suatu objek tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sistem nilai internal yang menjadi dasar dalam membentuk persepsi dan

emosi. Interaksi antara pengetahuan dan nilai inilah yang membentuk koherensi atau konsistensi antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan seseorang dalam menyikapi suatu hal (Wawan & Dewi, 2017, hlm. 25).

Rosenberg dalam menjelaskan bahwa dimensi kognitif dalam sikap tidak hanya terbatas pada penguasaan informasi atau pengetahuan tentang suatu objek, tetapi juga mencakup keyakinan individu mengenai keterkaitan antara objek tersebut dengan sistem nilai yang diyakininya. Ia menegaskan bahwa terdapat hubungan yang erat dan konsisten antara komponen afektif dan komponen kognitif dalam struktur sikap seseorang. Dalam pandangannya, kedua komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam sebuah keselarasan psikologis. Melalui pengembangan skala sikap, Rosenberg menunjukkan bahwa semakin positif sikap individu terhadap suatu objek, maka semakin tinggi pula tingkat kognitif atau pemahaman dan keyakinannya terhadap objek tersebut, begitu pula sebaliknya. Karena afeksi dan kognisi saling berhubungan dalam suatu sistem yang konsisten, maka perubahan pada salah satu aspek, misalnya keyakinan atau pemahaman (kognitif), akan memberikan dampak terhadap emosi atau perasaan (afektif) yang menyertainya, dan sebaliknya (Wawan & Dewi, 2017, hlm. 25–26).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan keterkaitan antara kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan dan sikap demokratis. Misalnya penelitian Lion & Alexandro (2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang mencakup kecerdasan warga negara (X1), tanggung jawab warga negara (X2), dan partisipasi warga negara (X3), memberikan pengaruh positif terhadap sikap demokratis (Y) peserta didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri se-Kota Palangka Raya. Dengan kata lain, semakin tinggi pemahaman peserta didik terhadap materi kewarganegaraan, semakin besar rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta semakin aktif keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk partisipasi sosial dan politik, maka semakin kuat pula sikap demokratis yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa PKn berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk karakter warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan partisipatif. Selain itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hasibuan dan Setiawan (2024) juga menguatkan temuan tersebut, yaitu bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan melalui mata pelajaran PPKn memiliki hubungan dengan pembentukan sikap demokratis dan civic disposition (karakter kewarganegaraan) peserta didik, meskipun tingkat pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan PPKn tetap berperan dalam menanamkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan, namun dampaknya terhadap perubahan sikap peserta didik belum terlihat secara nyata dan kuat dalam konteks keseharian. Temuan ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa meskipun PPKn telah mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial, peserta didik belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam bentuk sikap atau tindakan.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah pengaruh civic knowledge sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan terhadap sikap demokratis, khususnya dalam konteks lokal seperti Kabupaten Kuningan. Padahal, konteks lokal sangat mempengaruhi bagaimana peserta didik menerima, mengolah, dan menginternalisasi pengetahuan kewarganegaraan. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dimana berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan rumusan untuk menguji secara empiris pengaruh dari variabel *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dengan sikap demokratis peserta didik, serta untuk memberikan gambaran

mengenai potensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Khususnya pada ruang lingkup wilayah penelitian, yaitu di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode survei, khususnya jenis survei *cross-sectional*. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pada satu waktu tertentu dari sampel yang merepresentasikan populasi yang diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo dalam Maidina (2021), survei *cross-sectional* berfungsi untuk menghimpun data yang bersifat deskriptif maupun prediktif mengenai karakteristik, tingkat prevalensi, serta hubungan antar variabel dalam suatu populasi tertentu. Oleh karena itu, metode survei *cross-sectional* dianggap sesuai untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan kewarganegaraan dan sikap demokratis peserta didik dalam satu waktu. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Adapun lokasi pengambilan data difokuskan pada sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di kawasan Kabupaten Kuningan bagian Timur. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan geografis dan representasi wilayah, serta telah ditentukan sebelumnya sebagai lokasi yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan penelitian. Populasi dalam penelitian ini merujuk pada jumlah peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam data resmi yang diakses melalui situs Dapodik Dikdasmen Kemendikbud RI (2025), yaitu sebanyak 20.862 peserta didik.

Dalam menentukan sampel penelitian, digunakan teknik *cluster sampling* atau teknik pengambilan sampel berdasarkan wilayah atau kelompok tertentu. Teknik ini dipilih untuk mempermudah proses pengambilan data di lapangan dengan mempertimbangkan sebaran geografis sekolah-sekolah SMA di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) yang ditetapkan sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut terhadap populasi sebanyak 20.862 peserta didik, diperoleh ukuran sampel sebesar 392,475 orang. Untuk memudahkan proses pelaksanaan pengumpulan data dan menghindari pembulatan ke bawah yang dapat mengurangi representativitas, jumlah ini kemudian dibulatkan ke atas menjadi 393 responden. Jumlah ini dianggap telah cukup untuk merepresentasikan populasi secara proporsional dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid secara statistik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu tes dan angket. Instrumen pertama berupa soal tes pilihan ganda yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan peserta didik. Tes ini mencakup berbagai aspek materi kewarganegaraan yang berkaitan dengan pengetahuan pokok yang perlu dimiliki oleh warga negara dan relevan dengan kurikulum. Instrumen ini bertujuan untuk seberapa tinggi tingkat pengetahuan kewarganegaraan peserta didik terhadap konsep serta nilai dan prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta nilai-nilai ideologi dan konstitusi. Instrumen kedua berupa angket skala sikap yang digunakan untuk mengukur kecenderungan sikap demokratis peserta didik. Angket ini disusun dalam bentuk pernyataan yang mencerminkan indikator-indikator sikap demokratis, meliputi sikap toleran, menghargai perbedaan pendapat, keterbukaan terhadap kritik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Responden diminta untuk memberikan tanggapan berdasarkan skala penilaian tertentu, seperti skala Likert, yang memungkinkan peneliti menilai intensitas sikap peserta didik terhadap nilai-nilai demokrasi. Melalui kombinasi kedua instrumen ini, penelitian dapat menggambarkan hubungan antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan dan kecenderungan sikap demokratis secara lebih komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Kewarganegaraan Peserta Didik SMA di Kabupaten Kuningan

Menurut Arikunto, hlm. (2010, hlm. 66), tingkat pengetahuan individu dapat diinterpretasikan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan persentase skor yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dalam hal ini, digunakan skala kategorisasi yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap tingkat pengetahuan responden. Skala tersebut membagi hasil penilaian menjadi tiga kategori utama. Pertama, kategori “baik” diberikan kepada individu yang memperoleh skor antara 76% hingga 100%, yang mencerminkan tingkat penguasaan materi yang tinggi. Kedua, kategori “cukup” mencakup rentang skor antara 56% hingga 75%, yang menunjukkan pemahaman yang moderat atau sedang. Terakhir, kategori “kurang” apabila capaian skor berada di bawah 56%, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan yang dimiliki masih rendah dan belum memadai.

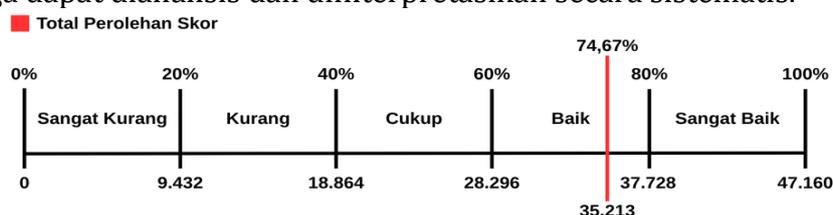
Tabel 1. Distribusi Tingkat Civic Knowledge Peserta Didik SMA di Kabupaten Kuningan

Kategori Tingkat Pengetahuan	Rentang Nilai	Frekuensi (peserta didik)	Persentase (%)
Baik	76 - 100	300	76,33
Cukup	56 - 75	71	18,07
Kurang	<56	22	5,60
Jumlah Total		393	100,00

Berdasarkan hasil analisis data mengenai tingkat pengetahuan kewarganegaraan peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki pemahaman yang tergolong tinggi. Dari total 393 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebanyak 300 peserta didik atau sekitar 76,34% termasuk dalam kategori “baik”, yaitu memiliki skor dalam rentang 76 hingga 100. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah menguasai materi kewarganegaraan dengan baik. Sementara itu, 71 peserta didik atau 18,07% tergolong dalam kategori “cukup”, dengan skor antara 56 hingga 75, yang mengindikasikan adanya pemahaman yang moderat namun masih memerlukan penguatan. Adapun sebanyak 22 peserta didik, atau 5,60%, masuk dalam kategori “kurang” karena memperoleh skor di bawah 56, yang mencerminkan peserta didik tersebut masih memiliki kompetensi *civic knowledge* yang rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat pengetahuan kewarganegaraan peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan sudah berada pada level yang baik.

Sikap Demokratis Peserta Didik SMA di Kabupaten Kuningan

Teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sikap demokratis peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan klasifikasi interval. Bachri (2019, hlm. 10) menjelaskan bahwa klasifikasi interval merupakan metode pengelompokan data berdasarkan pembagian rentang nilai ke dalam beberapa bagian dengan jarak antarinterval yang sama. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengelompokkan hasil pengukuran, seperti skor kuesioner atau nilai tes, ke dalam tingkatan tertentu sehingga dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis.



Gambar 1. Klasifikasi Sikap Demokratis Peserta Didik SMA di Kabupaten Kuningan

Hasil analisis data menggunakan metode klasifikasi interval menunjukkan bahwa secara umum sikap demokratis peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan berada pada kategori baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil tabulasi data yang menunjukkan bahwa total skor kumulatif yang diperoleh dari seluruh responden mencapai 35.213 poin. Jika dibandingkan dengan skor maksimal yang mungkin dicapai, nilai tersebut setara dengan rata-rata persentase tingkat pencapaian sebesar 74,67%. Persentase ini menempatkan kecenderungan sikap demokratis peserta didik pada kategori baik menurut pedoman klasifikasi yang digunakan dalam penelitian. Artinya, sebagian besar peserta didik menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat, serta inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh Civic Knowledge Terhadap Sikap Demokratis Peserta Didik SMA di Kabupaten Kuningan

Analisis untuk menguji pengaruh variabel *civic knowledge* (X) terhadap variabel sikap demokratis (Y) dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana perubahan dalam pengetahuan kewarganegaraan dapat berkontribusi terhadap perubahan sikap demokratis secara langsung, linier, dan terukur. Regresi linear sederhana dinilai tepat digunakan karena hanya melibatkan satu variabel prediktor (X) dan satu variabel terikat (Y), sehingga hubungan keduanya dapat dianalisis secara fokus dan mendalam. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengevaluasi signifikansi hubungan antara kedua variabel, mengetahui arah pengaruh (apakah positif atau negatif), serta mengukur kekuatan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Dimana analisis ini juga memberikan informasi kuantitatif mengenai seberapa besar variasi dalam sikap demokratis peserta didik yang dapat dijelaskan oleh *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) yang dimilikinya.

Tabel 2. Tabel Ringkasan Model Regresi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.733 ^a	0.537	0.536	1.468

a. Predictors: (Constant), Civic Knowledge

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang ditampilkan pada Tabel 2, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,537. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 53,7% variasi dalam sikap demokratis peserta didik dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan kewarganegaraan sebagai faktor prediktor utama. Dengan kata lain, lebih dari separuh perubahan atau perbedaan dalam sikap demokratis peserta secara statistik dapat ditelusuri kembali pada sejauh mana peserta didik memahami dan menguasai materi pada ruang lingkup civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan).

Tabel 3. Tabel Koefisien Regresi

Coefficients^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	81.483	0.387		210.474	0.000
Pengetahuan Kewarganegaraan	0.242	0.011	0.733	21.317	0.001

a. Dependent Variable: Sikap Demokratis

Merujuk pada hasil analisis regresi yang tercantum dalam Tabel 3, diperoleh bahwa konstanta memiliki nilai sebesar 81,48. Angka ini menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan kewarganegaraan tidak memberikan pengaruh apa pun (diambil nilai X diasumsikan = 0), maka tingkat sikap demokratis peserta didik diperkirakan berada pada angka 81,483. Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel pengetahuan kewarganegaraan tercatat sebesar 0,242, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara *civic knowledge* terhadap sikap demokratis peserta didik. Hasil ini mempertegas bahwa pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek kewarganegaraan berkontribusi secara signifikan dalam membentuk sikap demokratis di kalangan peserta didik.

Pembahasan

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel pengetahuan kewarganegaraan, yang merepresentasikan dimensi kognitif dalam struktur sikap, tidak sepenuhnya mampu membentuk sikap demokratis siswa secara utuh. Hal ini tercermin dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,537. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 53,7% variasi dalam sikap demokratis peserta didik dapat dijelaskan melalui pengaruh pengetahuan kewarganegaraan sebagai variabel prediktor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek kognitif yang tercermin dalam pemahaman kewarganegaraan memberikan kontribusi sebesar 53,7% terhadap pembentukan sikap demokratis siswa. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 46,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, yang kemungkinan mencakup dimensi afektif dan konatif juga berperan dalam membentuk sikap demokratis individu. Ghazali, hlm. (2016, hlm. 95)) menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) dapat diinterpretasikan berdasarkan kategori kekuatan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jika nilai R^2 mencapai 0,67 atau lebih, maka hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediktif yang kuat. Sebaliknya, nilai sekitar 0,33 mencerminkan tingkat kekuatan sedang atau moderat, sedangkan nilai sebesar 0,19 atau lebih rendah menunjukkan kemampuan penjelasan yang lemah terhadap variasi variabel dependen. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai R^2 yang diperoleh, maka semakin besar pula proporsi variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model tersebut, sehingga model regresi dianggap semakin baik dalam memprediksi fenomena yang diteliti.

Berdasarkan pedoman interpretasi tersebut koefisien determinasi (R^2), dapat disimpulkan bahwa kontribusi *civic knowledge* terhadap pengembangan sikap demokratis siswa berada pada kategori sedang atau moderat. Hal ini menandakan bahwa meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan, aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan sikap demokratis di kalangan siswa. Relevansi temuan ini semakin diperkuat oleh hasil uji signifikansi terhadap koefisien regresi variabel pengetahuan kewarganegaraan, yang tercatat pada angka 0,001. Karena nilai signifikansi tersebut berada jauh di bawah ambang batas probabilitas 0,05, maka dapat ditegaskan bahwa pengaruh variabel ini terhadap sikap demokratis siswa bersifat signifikan secara statistik. Kendati demikian, masih terdapat sebesar 46,3% dari keseluruhan variasi dalam sikap demokratis siswa yang belum dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Temuan ini menunjukkan adanya kontribusi faktor lain di luar variabel pengetahuan kewarganegaraan yang turut berperan dalam membentuk sikap demokratis siswa SMA di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan kerangka teoritis mengenai struktur sikap yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menafsirkan bahwa aspek-aspek lain seperti dimensi

afektif dan konatif turut berkontribusi dalam proses pembentukan sikap tersebut. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan Azwar yang dikutip dalam Wawan dan Dewi (2017, hlm. 25), yang menjelaskan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen utama, yakni kognitif, afektif, dan konatif. Dalam konteks ini, pengetahuan kewarganegaraan merepresentasikan aspek kognitif, yaitu bagian dari struktur sikap yang mencerminkan pemahaman, keyakinan, atau pengetahuan individu terhadap suatu objek sikap, yang dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Komponen ini berperan sebagai landasan awal dalam membangun sikap, karena melalui pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai demokrasi, individu akan memiliki kerangka berpikir yang mendukung terbentuknya sikap demokratis yang lebih kuat dan rasional.

Pemahaman kognitif pada hakikatnya dapat memberikan dasar penting dalam membentuk sikap, tapi hal tersebut belum cukup untuk menghasilkan sikap yang utuh dan menyeluruh. Aspek afektif, yang mencerminkan respons emosional atau perasaan individu terhadap nilai-nilai demokrasi, serta aspek konatif, yang berkaitan dengan dorongan atau kecenderungan untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip demokratis, juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pembentukan sikap. Oleh karena itu, meskipun kontribusi pengetahuan kewarganegaraan terhadap sikap demokratis mencapai 53,7% dan menunjukkan pengaruh yang penting serta signifikan, hal ini belum mencakup keseluruhan dimensi yang membentuk sikap. Artinya, untuk membentuk sikap demokratis secara utuh, dibutuhkan integrasi antara pemahaman kognitif dengan dimensi afektif dan konatif agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memiliki keterikatan emosional dan kesiapan untuk menerapkannya dalam perilaku nyata. Jika telaah melalui kerangka teori yang dikemukakan Rosenberg (teori konsistensi sefektif-kognitif), komponen kognitif dalam struktur sikap tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan mengenai suatu objek sikap. Lebih jauh lagi, elemen ini juga mencakup sistem keyakinan atau kepercayaan individu tentang bagaimana objek sikap tersebut terhubung dengan nilai-nilai pribadi yang ia anut. Rosenberg menekankan adanya hubungan yang selaras antara dimensi kognitif dan dimensi afektif dalam struktur sikap. Dimensi afektif ini merujuk pada reaksi emosional atau perasaan yang muncul ketika seseorang dihadapkan pada atau berinteraksi dengan objek sikap tertentu (Wawan & Dewi, 2017, hlm. 26). Oleh karena itu, pemahaman rasional maupun keyakinan intelektual terhadap suatu objek belum cukup untuk membentuk sikap secara utuh. Keterlibatan aspek afektif sebagai manifestasi emosi dan perasaan menjadi elemen penting yang memperkuat dan melengkapi komponen kognitif dalam proses pembentukan sikap individu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap demokratis peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan. Sebagian besar peserta didik memiliki tingkat *civic knowledge* yang tinggi, dengan persentase sebesar 76,33 persen peserta didik berada dalam kategori baik. Selaras dengan itu, sikap demokratis peserta didik SMA di Kabupaten Kuningan juga tergolong baik, dengan persentase pencapaian rata-rata sebesar 74,67 persen. Melalui analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,537. Ini berarti bahwa 53,7 persen variasi dalam sikap demokratis peserta didik dapat dijelaskan oleh tingkat *civic knowledge* yang mereka miliki. Dengan demikian, pengetahuan kewarganegaraan sebagai aspek kognitif memberikan kontribusi penting dalam membentuk sikap demokratis siswa. Namun, masih terdapat 46,3 persen pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti dimensi afektif, konatif, lingkungan sosial, pengalaman demokratis di sekolah, atau pengaruh media dan keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan *civic knowledge* perlu

diimbangi dengan penguatan aspek afektif dan perilaku, agar siswa tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi secara teoritis tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan secara kontekstual, integratif, dan partisipatif agar lebih efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis peserta didik. Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi sikap demokratis, termasuk peran lingkungan keluarga, budaya sekolah, aktivitas organisasi siswa, serta pengaruh digital dan media sosial. Pendekatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual atau metode berbasis pengalaman, seperti simulasi pemilu, debat kelas, atau musyawarah siswa, juga dapat menjadi strategi yang tepat untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara lebih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalul Birri, A., Dwi Ferawati, Y. & Rifa, A. 2023. Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Demokratisasi dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Peradaban*, 1(2). Tersedia di <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jkp>.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyati, B.S., Az Zahra, F., Naima, N. & Hasanah, N. 2024. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1): 687–693. Tersedia di <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1192>.
- Ghozali 2016. *Konsep, Teknik & Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. 2 ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Husni, F. 2021. The use of qr-code media in PKN subjects to foster the democratic character of 21st century students. *Ijtihad*, 37(1): 1–12.
- Jamaludin & Alanur S, S.N. 2021. Pengembangan Civic Knowledge dan Literasi Informasi melalui Case Method pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1): 28–36.
- Latif, N.F., Nurfaizah & Amrah 2024. Penerapan Model Value Clarification Technique (VCT) Untuk Meningkatkan Civic Knowledge Siswa Sekolah Dasar di Kepulauan Selayar. *Pinisi Journal of Education*, 4(3): 88–99. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Lion, E. & Alexandro, R. 2014. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terhadap Sikap Demokratis Siswa SMA Negeri Se Kota Palangka Raya (Survey Terhadap Siswa Kelas XI SMA Negeri di Kota Palangka Raya). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2(2): 71–82. Tersedia di <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>.
- Prabowo, N. 2023. Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1): 865–871.
- Ramadhan, M.F.S., Wahid, A., Rakhmawati, F.Y., Destriy, N.A., Hair, A., Harjo, I.W.W. & Utaminingsih, A. 2019. *Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Wawan, A. & Dewi, M. 2017. *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.